

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan merupakan *breakdown* dari perencanaan strategis (Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2019 yang merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, program dan kegiatan pada tahun 2019. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2019 ini berkaitan dengan telah ditetapkannya Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2019.

Di dalam Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2019 ini disajikan sasaran, indikator kinerja sasaran, target, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan dan pagu anggaran. Selain itu juga kondisi aktual baik internal dan eksternal serta analisisnya. Format ini tentunya selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kinerja Tahunan 2019 diharapkan menjadi pedoman Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Purworejo, 19 Agustus 2019

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



Drs. SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630906 198603 1 018

RINGKASAN

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan gencarnya upaya pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, maka diperlukan pengembangan dan penerapan Sistem yang menggambarkan kinerjanya dalam mencapai visi, misi dan tujuannya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari berlakunya Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Asas Akuntabilitas mengatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (rakyat) sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu maka Pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan Inpres ini maka seluruh unsur penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan kepada perencanaan strategis. Dengan perencanaan strategis (Renstra tahun 2016-2021) yang jelas dan sinergis maka instansi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah lebih dapat menyelaraskan visi dan misi sesuai dengan potensi, peluang dan menghadapi ancaman kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) maka disusun Perubahan Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 PENGERTIAN PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
1.2 DASAR HUKUM	6
1.3 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA	7
1.4 KONDISI AKTUAL	10
1.5 ANALISIS SWOT TAHUN 2019	10
BAB II TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	15
2.1 TUJUAN	15
2.2 SASARAN	15
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	16
3.1 PROGRAM	16
3.2 KEGIATAN	17
3.3 INDIKATOR KINERJA	19
BAB IV PENUTUP	24
KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG RKT	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan guna mencapai *outcome*. Penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan dokumen Renstra dan telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P).

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Surat Edaran MENPAN Nomor 31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja;
8. Keputusan Kepala LAN tanggal 25 Maret 2003 Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021;

10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 17 Seri A Nomor 2);
12. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 915/DPPA-10/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019.

1.3 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

BPBD dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan sewaktu-waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi:

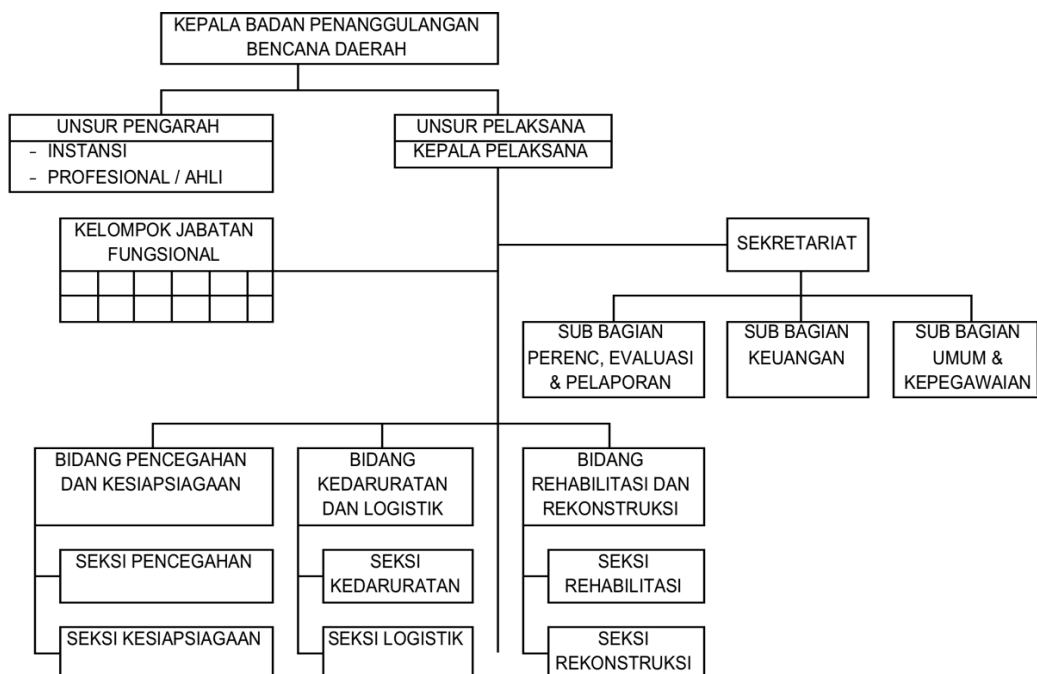
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan senantiasa bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
4. Pembinaan UPT dalam lingkup penanggulangan bencana;
5. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo terdiri meliputi:

1. Kepala Badan, membawahi:
 - a. Unsur Pengarah;
 - b. Unsur Pelaksana, membawahi:
 - 1) Sekretariat;
 - 2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 3) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - 5) UPT; dan
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional
2. Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
3. Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
4. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretaris membawahi:
 - a. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - b. Kasubbag Keuangan; dan
 - c. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.
5. Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
6. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:
 - a. Kasi Pencegahan; dan
 - b. Kasi Kesiapsiagaan.

7. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:
 - a. Kasi Kedaruratan; dan
 - b. Kasi Logistik.
 8. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:
 - a. Kasi Rehabilitasi; dan
 - b. Kasi Rekonstruksi.
 9. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
 10. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.
- Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo



Sumber: Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012.

1.4 KONDISI AKTUAL

Kondisi aktual yang dapat menjadi fokus tahun 2019 berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018 *issue* strategis yang berkembang serta prediksi situasi dan kondisi tahun 2019.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Keterbatasan sumberdaya aparatur; jumlah PNS BPBD hanya 28 orang;
2. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum seluruhnya sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki baik itu sarana prasarana penunjang administrasi kantor maupun yang untuk penanganan bencana;
4. Keterbatasan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Purworejo;
5. Koordinasi lintas Perangkat Daerah yang masih belum optimal. Adanya Perangkat Daerah yang hanya menunggu perintah belum mampu secara inisiatif melakukan tindakan ketika terjadi bencana. Ada Perangkat Daerah yang tidak terkoordinir menyebabkan proses penanganan menjadi tumpang tindih;
6. Peran dunia usaha dan masyarakat belum optimal dalam menangani darurat bencana;
7. Masyarakat terdampak bencana masih bergantung pada pemerintah dalam upaya melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas, hal yang menjadi *strategic issued* dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo adalah:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
2. Mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi baik dari unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

1.5 ANALISIS SWOT TAHUN 2019

Untuk menghadapi beberapa isu strategis tersebut, maka perlu adanya analisis pemetaan kekuatan dan kelemahan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun 2019. Perlunya melakukan pemetaan kekuatan dan kelemahan tersebut adalah agar didapat strategi dan kebijakan terbaik untuk

menghadapi permasalahan isu strategis yang ada sesuai dengan kondisi internal dan eksternal dalam kajian kekuatan dan kelemahan melalui sebuah analisis strategis. Analisis yang digunakan untuk pemetaan tersebut adalah Analisis SWOT yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Faktor Internal

a. Strength (Kekuatan)

- Personil lapangan yang relatif muda dan merata dalam hal penanggulangan bencana;
- Kebijakan daerah yang menetapkan penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas daerah;
- Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Telah terbangun sistem komunikasi antar stakeholder lintas sektor terjalin dengan baik melalui komunikasi kelompok setiap saat setiap hari;
- Kesiapsiagaan BPBD dan *stakeholders* on call 24 jam.

b. Weakness (Kelemahan)

- Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur/personil BPBD;
- Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (*Reward and Punishment*);
- Belum optimalnya koordinasi dan dukungan lintas *stakeholders* ;
- Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD;
- Alokasi anggaran kegiatan operasional dalam penanggulangan bencanabelum optimal.

2. Faktor Eksternal

a. Opportunities (Peluang)

- Banyaknya organisasi dan masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana;
- Dukungan dari pemerintah pusat (Kementerian, BNPB, SAR, dll), instansi vertikal di wilayah (TNI, POLRI,dll) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tinggi terkait kebijakan penanggulangan bencana;
- Dukungan kabupaten sekitar yang tinggi dalam upaya penanggulangan bencana saat terjadi bencana;

- Regulasi yang fleksibel dalam hal penanganan dan pengelolaan penanggulangan bencana.
- b. Threats (Ancaman)
- Kabupaten Purworejo merupakan daerah rawan bencana nomor 2 (dua) se Jawa Tengah dan nomor 18 (delapan belas) Nasional;
 - Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - Penanganan bencana yang terlambat dapat menimbulkan korban jiwa yang lebih besar;
 - Ancaman bencana longsor dan banjir saat musim penghujan dan ancaman bencana kekeringan di musim kemarau.

Setelah diketahui faktor internal dan eksternal kemudian diinteraksikan untuk mendapatkan strategi kebijakan yang paling tepat dalam menghadapi permasalahan dan isu strategis di bidang penanggulangan bencana, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
ANALISIS SWOT

EKSTERNAL	<p>Opportunities (Peluang) Banyaknya organisasi dan masyarakat yang bergerak di bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana.</p> <p>a. Dukungan dari pemerintah pusat (Kementerian, BNPB, SAR, dll), instansi vertical di wilayah (TNI, POLRI, dll) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tinggi terkait kebijakan penanggulangan bencana</p> <p>b. Dukungan kabupaten sekitar yang tinggi dalam upaya penanggulangan bencana saat terjadi bencana</p> <p>c. Regulasi yang fleksibel dalam hal penanganan dan pengelolaan penanggulangan bencana</p>	<p>Threats (Ancaman)</p> <p>a. Kabupaten Purworejo merupakan daerah rawan bencana nomor 2 (dua) se Jawa Tengah dan nomor 18 (delapan belas) nasional</p> <p>b. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana</p> <p>c. Penanganan bencana yang terlambat dapat menimbulkan korban jiwa yang lebih besar</p> <p>d. Ancaman bencana longsor dan banjir saat musim penghujan dan ancaman bencana kekeringan pada musim kemarau</p>	
INTERNAL	<p>Strength (Kekuatan)</p> <p>a. Personil lapangan yang relative muda dan merata dalam hal penanggulangan bencana</p> <p>b. Kebijakan daerah yang menetapkan penanggulangan bencana sebagai salah satu prioritas daerah</p> <p>c. Telah terbangun sistem komunikasi antar stakeholder lintas sector terjalin dengan baik melalui komunikasi kelompok setiap saat setiap hari</p> <p>d. Kesiapsiagaan BPBD dan stakeholders on call 24 jam.</p>	<p>Strategi S-O</p> <p>Memanfaatkan kemampuan personil BPBD, kesiapsiagaan on call 24 jam, hubungan antar personil dan stakeholder, dukungan organisasi dan masyarakat yang banyak serta dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah sekitar untuk semakin mendorong kebijakan prioritas penanggulangan bencana di Purworejo.</p> <p style="text-align: center;">OPTIMALISASI PERAN BPBD SEBAGAI LEADING SEKTOR PENANGGULANGAN BENCANA</p>	<p>Strategi S-T</p> <p>Memanfaatkan kemampuan personil BPBD, kesiapsiagaan on call 24 jam, hubungan antar personil dan stakeholder untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dan meminimalisir korban dan pemritaan atau sorotan negatif dari masyarakat dalam penanggulangan bencana di Purworejo.</p> <p style="text-align: center;">PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DAN STAKEHOLDERS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA</p>

Weakness (Kelemahan)	Strategi S-W	Strategi W-O
<p>a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur/personil BPBD</p> <p>b. Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)</p> <p>c. Belum optimalnya koordinasi dan dukungan lintas stakeholders</p> <p>d. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD</p> <p>e. Alokasi anggaran kegiatan operasional dalam penanggulangan bencana belum optimal</p>	<p>Memanfaatkan banyaknya organisasi dan masyarakat di bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana, dukungan pemerintah pusat, provinsi dan daerah sekitar untuk mengatasi keterbatasan jumlah aparatur, sarana prasaran, dan ketersediaan alokasi anggaran dalam penanggulangan bencana di Purworejo.</p> <p style="text-align: center;">PENGUATAN SINERGITAS ANTAR STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA</p>	<p>Mengatasi keterbatasan personil dan sarana prasarana serta alokasi anggaran serta upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meminimalisir korban dalam penanggulangan bencana di Purworejo</p> <p style="text-align: center;">MEMBUKA KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK</p>

Setelah dilakukan pemetaan analisis strategis menggunakan Analisis SWOT, maka diperoleh 4 (empat) strategi yang dapat dipilih salah satu atau beberapa sekaligus untuk dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam menghadapi permasalahan dan isu strategis yang telah ditetapkan. Strategi tersebut meliputi:

- a. Optimalisasi Peran BPBD Sebagai *Leading* Sektor Penanggulangan Bencana;
- b. Penguatan Sinergitas Antar *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana;
- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan *Stakeholders* dalam Penanggulangan Bencana;
- d. Membuka Kerjasama dan Bantuan dari Berbagai Pihak.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUJUAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan jangka menengah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan birokrasi.

Adapun indikator tujuan jangka menengah pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.

2.2 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan indikator sasaran (*impact*) merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan dari kumpulan beberapa *outcome*.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi penanggulangan bencana;
2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

Adapun indikator sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Capaian SPM Sub-Urusan Bencana Daerah;
2. Capaian kinerja perangkat daerah.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Selanjutnya diidentifikasi dan ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun yang menjadi program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan;
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan indikator-indikator program sebagai berikut:

- 1) Tingkat pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Tingkat kondisi sarana dan prasarana perkantoran;
- 3) Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik);
- 4) Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- 5) Ketersediaan Data Informasi Kebencanaan;
- 6) Kelompok Jejaring Kebencanaan;
- 7) Cakupan Wilayah Pencegahan Bencana;
- 8) Persentase Ketersediaan Analisis Jenis Bencana;

- 9) Cakupan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Kewilayahan;
- 10) Cakupan Kejadian Tanggap Darurat Yang Tertangani;
- 11) Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana;
- 12) Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Pasca Bencana;
- 13) Jumlah Desa Tangguh Bencana.

3.2 KEGIATAN

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan:
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 4) Penyediaan alat tulis kantor;
 - 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 7) Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 10) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
 - 11) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah;
 - 12) Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:
 - 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

- 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
- 4) Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya;
- 5) Pengadaan Pakaian Khusus;
- 6) Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kegiatan:
 - 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan:
 - 1) Penyusunan pelaporan keuangan;
 - 2) Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan.
5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan Kegiatan:
 - 1) Penyusunan Data Dasar Pembangunan.
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah Kegiatan:
 - 1) Posko Siaga SAR;
 - 2) Pelatihan SAR Penanganan Bencana;
 - 3) Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana;
 - 4) Penyuluhan Daerah Rawan Bencana;
 - 5) Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana;
 - 6) Penyusunan Rencana Kontijensi;
 - 7) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana;
 - 8) Pengadaan Early Warning System;
 - 9) Kegiatan Tanggap Darurat Bencana;
 - 10) Tim Kaji Bencana;
 - 11) Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam;
 - 12) Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB);
 - 13) Gladi Posko Pusdalops;
 - 14) Gladi Lapang Penanggulangan Bencana;
 - 15) Pemantauan Lokasi Pasca Bencana;
 - 16) Pelatihan Recovery Pasca Bencana;

- 17) Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA);
- 18) Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekon Akibat Bencana;
- 19) Fasilitasi Desa Tangguh Bencana;
- 20) Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana;
- 21) Pengadaan Tanah Relokasi Bencana.

3.3 INDIKATOR KINERJA

Adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kegiatan yang dimaksud mengacu pada kegiatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2019
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang dilayani	100%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Layanan surat menyurat	12 bulan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran tagihan telepon, listrik, air	12 bulan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	12 bulan
4	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	46 Jenis
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 jenis
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	24 jenis

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2019
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar	3 jenis
8	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan minuman	12 bulan
9	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 bulan
11	Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	21 jenis
12	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	13 jenis
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	2.900 m2
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2, excavator	3 kendaraan roda 6, 3 kendaraan roda 4, 20 kendaraan roda 2, 2 excavator
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan komputer dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan
4	Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Kain Batik Lokal Purworejo	28 potong
5	Pengadaan Pakaian Khusus	Tersedianya Pakaian Khusus	38 stel
6	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Peralatan Penanggulangan Bencana	4 unit perahu 3 unit pompa air 2 mesin temple

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2019
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelatihan teknis dasar (wajib) aparatur pelaksana manajemen penanggulangan bencana	60 orang
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan	100%
1	Penyusunan pelaporan keuangan	Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan serta dokumen pertanggungjawaban dana non APBD	18 dokumen APBD dan 2 dokumen Non APBD
2	Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan	Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA, LAKIP, LKPJ dan SPIP	7 dokumen
	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase ketersediaan data dasar pembangunan	100%
1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Database dan informasi spasial, monitoring, evaluasi dan pengendalian kebencanaan	1 Dokumen
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	Terpenuhinya pelayanan informasi Kawasan Rawan Bencana	100%
1	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	Sosialisasi penanggulangan bencana	120 desa/kelurahan 3 Sekolah dasar
2	Fasilitasi Desa Tangguh Bencana	Pembentukan desa tangguh bencana	15 Desa

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2019
		Terpenuhinya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3	Pelatihan SAR Penanganan Bencana	Pelatihan SAR	21 orang
4	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen rencana kontinjensi banjir	1 dokumen
5	Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana	Pelatihan tanggap bencana	20 orang
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Pemeliharaan EWS tsunami. Longsor, banir sanalat berat	21 unit
7	Pengadaan Early Warning System	Tersedianya alat deteksi dini bencana	2 unit
8	Gladi Posko Pusdalop	Gladi personil posko Pusdalop	50 orang
9	Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Gladi personil dan masyarakat	500 orang
10	Pelatihan Recovery Pasca Bencana	SDM yang terlatih recovery pasca bencana	30 Orang
11	Pelatihan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA)	Pelatihan pengkajian DaLA dan HRNA	40 orang
		Persentase Pelayanan penyelamatan / evakuasi korban bencana	100%
12	Posko Siaga SAR	Layanan posko siaga SAR	3 posko
13	Kegiatan Tanggap Darurat Bencana	Penanganan tanggap darurat bencana	12 bulan
14	Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)	Operasional Pusdalop PB	12 bulan
15	Tim Kaji Bencana	Bahan kebijakan pengkajian bencana	1 dokumen

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2019
16	Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana	Fasilitasi/pendampingan FPRB	12 bulan
		Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	100%
17	Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam	Pengelolaan logistik kebencanaan	16 jenis
		Meningkatnya fasilitasi rehab rekon kerusakan rumah/sarana umum akibat bencana	100%
18	Penyusunan Rencana Teknis Rehab Rekon Akibat Bencana	Dokumen rencana teknis rehab rekon	1 dokumen
19	Pemantauan Lokasi Pasca Bencana	Dokumen informasi detil calon lokasi rehab rekon pasca bencana	1 dokumen
20	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	Fasilitasi penerima bantuan sosial perbaikan rumah akibat bencana	25 rumah
21	Pengadaan tanah relokasi bencana	Tersedianya tanah relokasi	2 lokasi
		Meningkatnya rehabilitasi psikososial akibat bencana	100%
		-	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan merupakan bagian dari Rencana Kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen Perubahan Rencana Kinerja Tahunan adalah suatu dokumen rencana kinerja tahunan, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan beserta target keluaran (output) dan target kinerja per program / kegiatan yang dituangkan dalam bentuk formulir rencana Perubahan Rencana Kinerja Tahunan. Program kegiatan didasari pada situasi kondisi yang menjadi kebutuhan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2019.

Demikian Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ini dibuat untuk dijadikan sebagai acuan serta untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Semoga Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 ini dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Purworejo, 19 Agustus 2019
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Drs. SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630906 198603 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 14B Telp/Fax (0275) 325667 Purworejo 54113
email: bpbd@purworejokab.go.id Website : <http://bpbd.purworejokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 040.25 / 416 A / 2019

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap penyusunan Rencana Kerja perlu menetapkan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 - 2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 17 Seri A Nomor 2);
8. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 915/DPPA-10/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Pengesahan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM
BAB III : KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BAB IV : PENUTUP

Perubahan Rencana Kinerja Tahunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2019

- LAMPIRAN : 1. MATRIK RENCANA STRATEGIS
2. MATRIK RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019
3. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2019

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



Drs. SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630906 198603 1 018
Purworejo, 19 Agustus 2019